

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota. Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan jasa pada tahun anggaran harus dianggarkan dalam APBD (Kawedar dkk, 2008:100). Menurut PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, “APBD merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah”.

Fahmi dan Hariani (2019) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh PAD dan DAU Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Modal di Pemerintah daerah Kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian asosiatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis kuantitatif. Tehnik analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh secara bersama dan parsial terhadap Belanja Modal.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 mengatur mengenai kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat kesejahteraan rakyat, termasuk dalam kewenangan untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah sendiri. Dengan adanya otonomi, maka daerah diharapkan menjadi mandiri di dalam pengelolaan keuangan yang ditandai dengan makin kuatnya Kapasitas Fiskal atau PAD suatu daerah sehingga daerah tidak selalu bergantung kepada pemerintah pusat maupun Provinsi melalui Dana Perimbangan sesuai tujuan pelaksanaan otonomi untuk mendukung terciptanya kemandirian daerah.

Kemampuan suatu daerah untuk membiayai kegiatan operasional berbeda-beda, sehingga untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah tersebut Pemerintah Pusat memberikan bantuan dalam bentuk Dana Perimbangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dana perimbangan terbagi atas Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk

dikelola dan digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada publik.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nadiah dan Jacobus (2019) dengan judul PAD, DAU, DAK, DBH, Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal dan Dampaknya pada Pertumbuhan Ekonomi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa PAD, DAK, dan Luas Wilayah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, sedangkan DAU dan DBH tidak berpengaruh pada Belanja modal.

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan Kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Otonomi daerah pada hakekatnya berkenaan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan, kebijakan, pengelolaan dana public dan pengaturan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Sehubungan dengan adanya kebijakan otonomi daerah, hal penting yang harus diperhatikan adalah ketersediaan dana untuk membiayai tugas dan kewajiban yang makin bertambah. Tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penentu keberhasilan otonomi daerah, selain faktor kualitas aparat pemerintah daerah dan tingkat pendidikan masyarakat yang tinggi. Badan Pusat Statistik (2009) menyatakan bahwa realisasi PAD Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2008 terhimpun sekitar 4,5 triliun rupiah, naik sekitar 0,35

persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Oleh karena itu, kondisi kabupaten dan kota di Jawa Tengah secara umum berpotensi untuk lebih maju dibandingkan dengan daerah lain dengan adanya penyelenggaraan otonomi daerah dengan titik berat pada daerah kabupaten dan kota.

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian Nadiyah dan Jacobus (2019) yang berjudul PAD, DAU, DAK, DBH, Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal dan Dampaknya pada Pertumbuhan Ekonomi. Perbedaan penulisan ini dengan penulisan sebelumnya terdapat pada, variabel, dan tahun penelitian.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2017-2019”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul yang di kemukakan diatas, maka masalah ini dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh pada Belanja Modal pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2017-2019.
2. Apakah Dana Alokasi umum berpengaruh pada Belanja Modal pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2017-2019.

3. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh pada Belanja Modal pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2017-2019.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh pada Alokasi Belanja Modal pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2017-2019.
2. Untuk mengetahui apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh pada Alokasi Belanja Modal pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2017-2019.
3. Untuk mengetahui apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh pada Alokasi Belanja Modal pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2017-2019.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan akuntansi sektor publik.
- b. Dapat digunakan sebagai bahan referensi berkaitan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pentingnya mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan cenderung meningkatkan presentase alokasi Belanja Modal.
- b. Bagi Peneliti, Penelitian ini bermanfaat sebagai upaya dalam memahami lebih lanjut mengenai ilmu yang telah didapatkan sewaktu kuliah mengenai hal-hal yang terkait dengan sektor publik, yaitu tentang pemerintah daerah.
- c. Bagi Peneliti Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi lebih lanjut untuk penelitian selanjutnya dibidang akuntansi pada umumnya dan akuntansi pemerintahan pada khususnya.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dapat diterangkan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan tentang desain penelitian, popuasi dan sampel penelitian, data dan sumber data, metode pengumpulan data, variable penelitian, dan pengukuranya.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menyajikan dan menyelesaikan hasil pengumpulan data serta analisis data yang pada akhirnya merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah di kemukakan pada bab sebelumnya.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang uraian kesimpulan yang ditarik berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data, kekurangan dalam penelitian dan saran untu penelitian yang akan dating.